KANTOR REGIONAL XIV BKN LEMBAR PEREDARAN SURAT MASUK DAN KELUAR

Para				THE THE COME		
NO AGD	855	TGL:	M K	16(08/2023	RAHASIA SEGERA/MENDESAK PENTING	
		INDEK	<u> </u>		RUTIN	the feet of the second second second
ASAL NOMOR TANGGAL PERIHAL DILAMPIRK	: loo · 1·3·1/	*)- PB /	JM/2025 clata ke kab	DISPOSISI KAKANREG:	porlar
2. KABIE 3. KABIE 4. KABIE 5. KABIE 6. JFT M	G TATA USAHA D MUTASI DAN STAT D PENGANGKATAN (D INFORMASI KEPEG D PENGEMBANGAN	DAN PENSIUN AWAIAN DAN SUPERVIS	iiAN) MM		VIC



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Ataruri, Arfai Manokwari

Manokwari, / Agustus 2023

Nomor : 800.1.3.1/ 495 /DP-PB/VIII/2023

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Peralihan Data Ke Kabupaten

Kepada

Yth. Kepala Kantor Regional XIV BKN

di -

Tempat

Sehubungan dengan SK Penempatan Nomor: SK.824.3-197 an. SYAHRIL BUATAN, S.Pdl terhitung mulai tanggal 01 September 2018 ditempatkan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Emeyodere Kota Sorong, terkait penempatan tersebut Data Guru belum dialihkan ke Kota Sorong. Terkait hal tersebut mohon untuk dapat diproses, adapun dilampirkan Fotocopyan SK penempatan dan SKPP .

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Kepala BKD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 2. Arsip.



GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR: SK. 824.3 - 197

GUBERNUR PAPUA BARAT

Menimbang

: 1. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas, maka dipandang perfu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam surat keputusan ini ;

 bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditempatkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan

Mengingar

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

 Keputusan Kepala BKN Nomor 70/KEP/2003; 5. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003;

6. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 2 Tahun 2017.

Memperhatikan

: 1. Surat Rekomendasi Kepala SMA GUPPI Raja Ampat Nomor : 421.2.2/II/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018;

2. Surat Keterangan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Emeyodere Kota Sorong Nomor : 121/YE/MTs/SK/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama SYAHRIL BUATAN, S.PdI Tempat / tanggal lahir Waras waras, 26 Mei 1985 NIP

19850526 200909 1 001 Pendidikan Terakhir S-1/A-IV Pendidikan Agama Islam Tahun 2008

Pangkat / Golongan ruang/TMT Penata Tk. I (III/d) 01 Oktober 2017 Jabatan Guru Muda pada SMA GUPPI Raja Ampat Unit Kerja Lama

Dinas Pendidikan Instansi

Pemerintah Provinsi Papua Barat

terhitung mulai tenggal 01 September 2018 ditempatkan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Emeyodere Kota Sorong Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Manokwari : 23 Agustus 2018

a.n GUBERNUR PAPUA BARAT KEPALA BADAN KEPERAWAIAN DAERAH

> Drs. YUSTUS MERIDODGA Nip. 19610606 199403 1 004

Tembusan Yth :

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara di Manokwari;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari ;
- Kepala SMA GUPPI Raja Ampat Provinsi Papua Barat di Waisar
- Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Emeyodere Kota Sorong Provinsi Papua Barat di Sorong.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

SURAT KETERANGAN PENGHENTI AN PEMBAYARAN (SKPP)

Nonsor 991 / 15 / SKPP / II / 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KELIANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT Maximum apacient basimum

NES 198505252009091001 Nama SYAHRIL BUATAN S POLI Tarxigal Lahir 26 MEI 1985 Goiongan Penata Tk i III/d

Unit Kerja SMA GUPPI RAJA AMPAT

Sesue dengan Surat Keputusan dan Walikota Sorong

Nomor 824.3/84/2018, Ditetapkan di sorong 1 september 2018 terhitung mulai tanggal. 1 September 2018 yang bersangkutan dimutasikan ke. Pemerintah Kota Sorong Ga telah dibayarkan sampai dengan akhir bulan. Februari 2019 dengan perincian sebagai berikut

A. Penerimaan		B. Potongan-potongan	
Gay Pokok	3,149,100		71,799
Tunjangan Istn/Suami	314,910		287,198
Tunjangan Anak	125,964		107,699
Tun j Perb Penghsilan	0	Potongan Pajak	0
Tunjangan Struktural	0	Potongan BULOG	0
Tunjangan Fungsional	327,000		7,000
Tunjangan Beras	411,040		0
Tunjangan Umum	0	Potongan Sewa Rumah	0
Tunjangan Fungsi Khusus	0	Potongan Hutang	0
Tunjangan Kemahalan Daerah	500,000	Potongan JKK	7.558
Tunjangan Daerah Terpencil	125,000	Potongan JKM	22.674
Tunjangan Pajak	0		
Tunjangan Askes	107,699	Jumlah Potongan	503,928
Tunjangan JKK	7,558		500,520
Tunjangan JKM	22,674		
Pembulatan	83		
Jumlah Kotor	5,091,028	Jumlah Bersih	4,587,100

Daftar keluarga yang menjadi tanggungan :

Vo	Nama	Tgl.Lahir	Keterangan

Data hutang:

Jumlah Hutang	Keterangan
Rp. 0	
	NIHIL

MANOKWARI , 11 FEBRUARI 2019 ATI. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINST PARIA BARAT KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

> DIRSIA NATALIA, SE, MM NIP. 198012242003022001

Tembusan SKPP ini disampaikan kepada :

- 1. Kepala BKD Provinsi Papua Barat di Manokwan
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat di Manokwan
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari
- 4 Kepala BKD Kota Sorong di Sorong
- 5 Kepala BPKAD Kota Sorong di Sorong
- 6 Kepala Kantor Cabang PT, Taspen di Manokwan